

**POWER INTERPLAY KEPALA DAERAH DAN PERUBAHAN SUARA  
PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL  
(Studi Kasus di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari)**

Oleh: La Husen Zuada<sup>1</sup>, M. Najib Husain<sup>2</sup>, Dewi Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako, Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo, Kendari

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi Universitas Halu Oleo, Kendari

**Abstrak**

Artikel ini mengeksplorasi keterkaitan antara interaksi kekuasaan (*power interplay*) kepala daerah dan perubahan suara partai politik di tingkat lokal. Tulisan ini mengambil kasus perubahan suara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) di Kabupaten Muna Barat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Kendari pada pemilu 2019. Tulisan ini bertujuan menguraikan praktek interaksi kekuasaan kepala daerah, serta menjelaskan dampak interaksi kekuasaan terhadap perubahan suara partai politik. Tulisan ini menemukan kepala daerah melakukan interaksi kekuasaan untuk mempengaruhi aparat sipil negara (ASN), mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi camat, lurah dan kepala desa dan mempengaruhi partai politik. Permainan kekuasaan yang diperankan kepala daerah sangat efektif dalam meningkatkan jumlah kursi dan memenangkan partai politik pada Pemilu 2019. Partai NASDEM Kabupaten Muna Barat yang didukung oleh Bupati berhasil memenangkan Pemilu dan meningkatkan perolehan kursi legislatif dari 2 menjadi 9 kursi (kenaikan 350%). PKS Kota Kendari yang dipimpin Walikota Kota Kendari berhasil memenangkan Pemilu dan menaikkan perolehan kursi dari 4 menjadi 7 kursi (kenaikan 75%). Peningkatan suara dua partai ini berhasil mendudukkan kadernya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang belum pernah diraih sebelumnya. Pencapaian ini merupakan prestasi yang sangat spektakuler.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Pemilu, Perubahan Suara, *Power Interplay*.

---

**PENDAHULUAN**

Posisi kepala daerah di tingkat lokal sangat strategis. Kepala daerah meski berkedudukan sejajar dengan DPRD, tapi memiliki kewenangan lebih kuat dibanding dengan DPRD. Kedudukan kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif di tingkat lokal selain melekat kewenangan untuk melaksanakan aturan (eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk membuat aturan (peran legislasi). Dalam melaksanakan aturan, kepala daerah mengendalikan sejumlah sumber daya, diantaranya birokrasi (SDM) dan keuangan. Perangkat birokrasi merupakan bawahan kepala daerah yang tersebar hingga di level pemerintahan paling rendah, yang secara hierarkhis dituntut untuk tunduk pada atasan (kepala daerah). Kepala daerah juga memiliki kuasa untuk mengalokasikan keuangan dan menentukan rencana pembangunan di tingkat lokal. Hal ini memposisikan kepala daerah sebagai elit lokal yang memiliki jejaring dan sumber daya kekuasaan yang kuat.

Sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah ini menjadikan ia sangat dibutuhkan oleh partai politik atau kontestan Pemilu, agar bisa membantu memenangkan pertarungan elektoral. Keberpihakan kepala daerah dalam Pemilu

akan memudahkan partai politik meraih dukungan suara mayoritas. Kepala daerah dapat dengan mudah untuk memobilisasi birokrasi, mempolitisasi anggaran, serta mempolitisasi program dan kegiatan pembangunan (*pork barrel project*). Kekuasaan kepala daerah ini akan semakin kuat, jika ia juga merupakan pemimpin informal di luar institusi pemerintahan. Potret permainan kekuasaan dalam kontestasi elektoral tergambar dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari. Pada dua daerah ini, berdasarkan hasil observasi, pemberitaan media dan informasi dari pengawas Pemilu dan masyarakat, kepala daerah—Bupati dan Walikota—secara aktif memainkan peran kekuasaan, guna memenangkan partai politik dan calon legislatif yang dikehendaki oleh sang penguasa lokal.

Tekanan kekuasaan terhadap aparat sipil negara (ASN) merupakan keluhan para ASN pada Pemilu legislatif 2019 di Muna Barat. Para ASN secara terselubung maupun secara terang-terangan dalam pertemuan terbatas diarahkan untuk memilih partai Nasional Demokrat di Kabupaten Muna Barat. Bupati, para pejabat SKPD dan ASN secara terstruktur dan masif mensosialisasikan partai dan nama calon legislatif pada saat rapat-rapat terbatas maupun di kantor dan rumah jabatan. Disamping itu, para ASN ditekan dan diberi target untuk mengumpulkan minimal sepuluh suara setiap ASN. Bagi ASN yang tidak menjalankan intruksi atau dianggap mengkhianat, maka ancaman mutasi dan pemberhentian merupakan resiko yang harus ditanggung para ASN. Di Kabupaten Muna Barat intervensi dan ancaman dilakukan pula terhadap masyarakat penerima bantuan sosial, kepala desa dan intervensi terhadap partai politik dalam penempatan daftar calon legislatif.

Campur tangan kekuasaan dalam mensukseskan kemenangan partai yang melibatkan ASN juga tampak pada Partai Keadilan Sejahtera di Kota Kendari. Proses mutasi 244 pejabat pada tanggal 8 dan 12 April 2019 menjelang pemilihan legislatif 2019 (*inilahsutra.com*, 12/4/2019), memunculkan banyak spekulasi terkait dengan kepentingan elektoral. Untuk diketahui bahwa Walikota Kendari juga menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Kendari. Sebelumnya keterlibatan ASN Kota Kendari dalam mensukseskan kemenangan PKS terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) salah satu camat dengan dua calon legislatif PKS (*inilahsutra.com*, 3/3/2019). Peristiwa OTT ini merupakan fenomena ‘gunung es’ yang muncul dipermukaan tentang keterlibatan kekuasaan (walikota) dalam upaya memenangkan Pemilu.

Pasca dan sesudah pemilu keluhan warga Kota Kendari tentang ajakan lurah agar memilih partai dan calon legislatif PKS menjadi pembicaraan umum. Para warga, saat mengunjungi kantor kelurahan guna mengurus keperluan administrasi kependudukan (pengurusan SIUP dan pelayanan Posyandu) diajak untuk memilih PKS. Selain penggunaan ASN, Walikota Kendari juga memberikan pekerjaan sejumlah proyek (paket) pembangunan fisik kepada para caleg PKS. Penggunaan ASN dan alokasi pekerjaan proyek untuk kepentingan politik bukanlah fenomena baru di Kota Kendari, praktek ini merupakan pola yang pernah ditemukan dalam pemilihan Walikota Kendari 2017 (Nurdin dkk, 2017; Dewi dkk, 2017; Zuada dan Suaib, 2017).

Fenomena keterlibatan kekuasaan dalam kontestasi elektoral bukan hanya terjadi di Sulawesi Tenggara. Menurut Zuhro (2019), pada Pemilu 2019, pejabat pusat maupun daerah, mulai dari menteri, kepala daerah, kepala lembaga terlibat sebagai tim pemenangan Pilpres, hal ini terjadi pula tahun 2014. Menurut Zuhro, keberadaan birokrasi selain digunakan untuk melayani publik, juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Tak dipungkiri, bahwa sejak Pemilu secara langsung digulirkan, keterlibatan kepala daerah dalam memenangkan pertarungan elektoral merupakan kasus yang sering dijumpai di Indonesia. Studi Isna (2010) yang membahas tentang netralitas birokrasi dalam Pemilukada menyinggung tentang keterlibatan kepala daerah dalam melakukan politisasi birokrasi, seperti proses rekrutmen pejabat, promosi, penyalahgunaan fasilitas negara dan mobilisasi PNS. Studi lain dilakukan oleh Sihotang (2013), dalam Pilkada Kota Pekanbaru 2011, keterlibatan birokrasi dalam mendukung kepala daerah merupakan upaya politik balas jasa atas jabatan yang diberikan oleh kepala daerah.

Berbagai studi tentang keterlibatan kekuasaan seperti kepala daerah banyak menggunakan pendekatan legal/institusional. Dalam pendekatan ini kepala daerah diposisikan sebagai pemimpin birokrasi, yang memiliki kewenangan (otoritas hukum), yang secara aturan perundangan dilarang untuk terlibat dalam politik, dituntut untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Studi dengan pendekatan legal/institusional ini kurang mampu menjelaskan posisi kepala daerah sebagai elit politik. Sebagai elit politik kepala daerah juga memiliki kekuasaan informal, terlebih lagi jika merupakan tokoh kharismatik, tokoh pemuda atau lainnya. Kepala daerah sebagai manusia yang memiliki perilaku, tindakan, pergaulan yang luas. Oleh karena itu, studi ini mengkaji keterlibatan kepala daerah dalam konteks kekuasaan yang lebih luas, tidak sebatas pada kekuasaan formal, namun juga kekuasaan informal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan legal/institusional. Kajian ini menggunakan pendekatan behavioral dalam melihat peran kepala daerah mempengaruhi ASN, masyarakat dan partai politik. Sebagai pijakan teoritik kajian ini menggunakan konsep *power interplay* (kekuasaan). *Power interplay* dalam khas Indonesia diartikan sebagai interaksi kekuasaan, permainan kekuasaan atau dipahami pula sebagai pertarungan kekuasaan antara aktor-aktor politik. Dalam studi ilmu politik, kekuasaan merupakan salah satu kajian sentral dalam memahami mengapa sebuah kebijakan diambil dan strategi politik dilakukan. Laswell dan Kaplan mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan seorang individu atau kelompok, untuk mengubah perilaku dari individu atau kelompok lain sesuai cara yang dia kehendaki (Laswell dan Kaplan, 1950). Senada dengan itu Robert Dahl (1957) mengartikan kekuasaan sebagai "*power is here defined in terms of a relation between people, and is expressed in simple symbolic notation*". Penjelasan Dahl ini secara sederhana, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang (A) untuk mempengaruhi orang lain (B), dimana si B seharusnya tidak melakukannya. Bersandar pada defenisi

kekuasaan di atas, maka kekuasaan memiliki makna adanya dominasi atau hegemoni seseorang terhadap orang lain.

Defenisi lain tentang kekuasaan yang diutarakan oleh Foucault. Dalam membahas sumber kekuasaan, Foucault tidak melihat berdasarkan kekuasaan itu dijalankan secara (*legitimate*) atau otoritas hukum (*sovereign power*). Menurutnya kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi. Kekuasaan bisa tersebar di mana-mana, imanen terdapat dalam setiap relasi sosial (*disciplinary power*). Relasi kekuasaan bersifat intensional dan non-subjektif (Mudhoffir, 2013). Hal ini dapat dimaknai bahwa kekuasaan itu bukan hanya dipahami sebagai adanya otoritas hukum, tapi kekuasaan bisa bersumber dari gerak tubuh, ucapan dan tingkah laku sehari-hari. Senada dengan itu Boerdieu memperkenalkan *habitus*, *field* dan *capital* sebagai elemen yang membentuk kekuasaan. *Habitus* dipahami sebagai kebiasaan, penampilan diri atau merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh (Haryatmoko, 2003). Selanjutnya *field* merupakan jaringan, konfigurasi dan hubungan-hubungan objektif antar berbagai posisi (Krisdinato, 2014). Sedangkan *capital* atau modal adalah sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan (Karnanta, 2013). Bagi Bourdieu, dalam praktek kekuasaan, *habitus*, *field* dan *capital* terjalin hubungan dialektis maupun dualistis (timbang balik).

Miriam Budiarjo (1984) menyebut bahwa kekuasaan adalah gejala yang lumrah dalam setiap masyarakat yang hidup bersama, dimana setiap manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan. Pada abad pertengahan, strategi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang dipraktekan oleh penguasa diteorikan oleh Nicollo Machiavelli. Menurutnya kekuasaan dapat dipertahankan atau diraih dengan dua cara, kekerasan dan kelicikan. Pandangan Machiavelli ini didasarkan pada pengamatannya terhadap kekejaman kekuasaan yang dipraktekan oleh penguasa di Italia pada abad pertengahan. Dengan demikian, dalam pertarungan kekuasaan berbagai cara dapat dilakukan, mulai dari kerjasama, konflik, kekerasan, ke-licikan dan hegemoni.

Dalam negara demokrasi, idealnya pertarungan kekuasaan mengikuti kaidah-kaidah demokrasi. Dahl mensyaratkan bahwa dalam proses demokrasi (pemilihan/Pemilu) dilaksanakan secara bebas dan adil. Selama pemilihan dimanipulasi dan oposisi tidak dibolehkan, dikontrol atau dihalang-halangi, warga negara diancam serta hak-haknya dilanggar, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. William Case (2002) menyebut hal ini sebagai *pseudo democracy* yaitu demokrasi yang dijalankan secara reguler, namun proses pemilihan umum diwarnai kecurangan, kebebasan sipil dimatikan, dan parlemen dikontrol ketat oleh pemerintah. Adanya intervensi kekuasaan dalam proses pemilihan merupakan indikasi dari hilangnya konsep pemilu yang bebas dan adil.

Adapun, tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan tentang gambaran partai politik, proses pemilu dan perubahan suara partai Nasdem di Kabupaten Muna Barat dan PKS di Kota Kendari, serta menjelaskan *power interplay* kepala daerah di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari dalam Pemilu legislatif 2019.

Artikel ini juga bertujuan menjelaskan tentang dampak *power interplay* kepala daerah terhadap perkembangan partai politik, pemerintahan lokal dan demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moeloeng, 2005). Teknik pengumpulan data digunakan dengan menghimpun data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen dari pemberitaan media dan hasil pleno KPU. Selanjutnya, data primer diperoleh melalui catatan lapangan peneliti dan hasil wawancara dengan para informan. Dalam pengumpulan data primer di Kabupaten Muna Barat, penulis menemui dan mewawancarai 14 orang. Selanjutnya, di Kota Kendari menemui dan mewawancarai 8 orang informan. Selanjutnya data yang terkumpul dipilah lalu dipilih dengan menggunakan teknik triangulasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Setting Politik Muna Barat dan Kota Kendari**

Keberadaan partai politik merupakan salah satu indikator demokrasi. Betapa vitalnya partai politik dalam negara demokrasi dikemukakan oleh Clinton Rossiter, bahwa tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai. Huckhson yang dikutip oleh White (dalam Katz dan Crotty, 2014) mendefinisikan, partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Salah satu cara partai politik untuk berkuasa adalah memenangkan pemilihan, oleh karena itu dukungan elektoral sangatlah penting bagi partai politik dalam Pemilu.

Dalam setiap pemilu, perubahan suara partai politik merupakan hal yang biasa terjadi, sepanjang dalam batas kewajaran. Hal yang tidak wajar adalah perubahan suara terjadi sangat signifikan (drastis). Menurut Maiwaring dan Torcal (dalam Katz dan Crotty, 2014), perubahan suara (*electoral volatility*) dipahami sebagai perolehan agregat pemilihan dari satu partai ke partai lain, dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya. Capaian *electoral volatility* yang stabil merupakan salah satu indikator dari derajat kelembagaan partai politik. Sebaliknya jika *electoral volatility* mengalami perubahan (kenaikan dan penurunan) yang signifikan mengindikasikan partai politik belum terlembaga. *Electoral volatility* tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya kecenderungan beralihnya pemilih ke partai lain. Perpecahan pada tubuh partai, konflik atau ketidakstabilan (Nurhasim, 2013).

Muna Barat dan Kota Kendari merupakan dua daerah otonom yang terletak di Sulawesi Tenggara. Muna Barat berdiri sebagai daerah otonom pada tahun 2014, sedangkan Kota Kendari telah lebih dulu berdiri sejak 1996. Bila melihat kilas balik pemilu tahun 2014, kedua daerah ini memiliki kemiripan, yaitu merupakan basis kekuatan Partai Amanat Nasional, ini terlihat dari jumlah kursi yang dominan di DPRD. Pada Pemilu 2019, PAN tidak lagi menjadi partai pemenang Pemilu di

Muna Barat dan Kota Kendari, sebaliknya Partai Nasional Demokrat dan PKS merupakan partai peraih suara terbanyak. Kegagalan PAN untuk mempertahankan dominasi di Muna Barat tidak terlepas dari konflik internal PAN pada tahun 2018, yang berujung pada pemecatan Ketua DPD PAN Muna Barat, La Ode Rajiun Tumada.

Rajiun meski baru bergabung dengan PAN tahun 2018, tapi ia memiliki pengaruh yang sangat kuat baik di internal partai maupun pemilih/masyarakat. Di internal PAN, ia memiliki kedekatan dengan Nur Alam (mantan Ketua DPW PAN Sultra/Gubernur Sultra) dan Umar Samiun (Ketua DPW PAN pasca Nur Alam/Bupati Buton). Hubungan Nur Alam dengan Rajiun tak ubahnya orang tua dan anak, semasa menjadi Gubernur, Nur Alam mengangkat Rajiun sebagai Kepala Satpol PP Sulawesi Tenggara dan Pj. Bupati Muna Barat. Sementara hubungan Rajiun dengan Umar Samiun layaknya kakak adik yang sama-sama dibesarkan oleh Nur Alam.

Di kalangan pemilih Rajiun memiliki pengaruh sebagai mantan Pj. Bupati 2014-2016 dan Bupati terpilih pada Pilkada 2017. Semasamenjadi Pj. Bupati, ia telah menanamkan ingatan masyarakat Muna Barat dengan sejumlah pembangunan infrastruktur yang ia bangun. Hal ini menjadikan ia sangat disayangi oleh rakyat. Bagi masyarakat Muna Barat, Rajiun adalah sosok pahlawan yang melepas ketertinggalan Muna Barat, dimana pada masa lalu daerah ini tertinggal dari sisi infrastruktur. Sebelum terjun di birokrasi dan dunia politik, nama Rajiun telah populer, oleh masyarakat Muna, ia dianggap sebagai seorang pemberani dan memiliki prestasi olahraga yang menonjol. Rajiun merupakan juara internasional bela diri Karate, salah satu olahraga yang digemari oleh orang Muna, karena kemampuan berkelahi dan mengalahkan lawan. Keberhasilan Rajiun mengalahkan lawan berlangsung pula di dunia politik. Pada Pilkada Muna Barat tahun 2017 berhasil mengalahkan lawan beratnya, L.M Ikhsan Ridwan, anak politisi kawakan Golkar, Ridwan Bae yang dikenal memiliki jejaring luas dan royal akan uang. Kemenangan ini menjadikan Rajiun semakin melambung namanya.

Tertuang dalam riwayat hidupnya, Rajiun memiliki riwayat organisasi yang segudang, ia pernah menjadi Wakil Ketua GP. Ansor Sultra, Wakil Ketua KNPI Sultra dan Wakil Ketua HMI Manado. Ia juga merupakan panglima Brigade Soowite Bersatu (BSB) Sulawesi Tenggara, semacam kelompok milisi yang memiliki pengikut ribuan dengan ciri khas menggunakan pakaian berseragam loreng dan baret. Kebanyakan anggota BSB merupakan anak-anak muda yang mampu mengendalikan kekerasan. Saat momen elektoral BSB menjadi perangkat yang digunakan untuk menjaga lawan politik untuk mendistribusikan politik uang dan aktivitas kampanye, namun disaat yang bersamaan BSB digunakan sebagai ajang distribusi patronase (*services and activities*) melalui pagelaran olahraga sepak bola dan bola voli dengan nama BSB CUP. Selain itu, pada organisasi olahraga karate (LEMKARI) Rajiun dipilih sebagai Ketua Pengurus Daerah Sulawesi Tenggara. Pengikut LEMKARI yang tersebar hingga di level ranting menjadikan Rajiun sangat dikenal. Jaringan karate ini

pada beberapa kasus digunakan menjadi alat kampanye dan sosialisasi Caleg di Muna Barat. Rajiun juga memiliki kelompok diskusi dan pengendali opini publik dengan nama Rajiun Center. Peran Rajiun Center adalah men-*counter* serangan opini yang ditujukan pada Rajiun, serta mensosialisasikan keberhasilannya dengan memanfaatkan media massa.

Pemecatan Rajiun membawah dampak yang serius terhadap PAN. Keluarnya Rajiun di PAN diikuti pula oleh sejumlah pendukungnya baik politisi, anggota, dan masyarakat yang mengatasnamakan simpatisan PAN. Pada Pemilu 2019, Rajiun meski tidak bergabung ke partai lain, namun ia menjalin kedekatan dengan Partai Nasdem, partai yang juga menjadi tempat berlabuhnya, Asnawati Hasan (istri Nur Alam). Keberpihakan Rajiun terhadap Nasdem ditunjukkan dengan pencalonan orang-orang dekatnya di Partai Nasdem dan gerakan tersruktur memenangkan Caleg-Caleg Nasdem.

Penurunan suara PAN terjadi pula di Kota Kendari. Berbedadengan Muna Barat yang dilanda konflik internal, penurunan PAN di Kendari sebagai implikasi dari jerat hukum yang menimpah dua tokoh PAN, yaitu operasi tangkap tangan KPK terhadap walikota (anak) dan mantan walikota Kendari (bapak), Adriatma Dwi Putra dan Asrun. Anak dan Ayah ini merupakan sekertaris DPW PAN Sulawesi Tenggara dan Ketua DPD Kota Kendari yang mengantarkan PAN meraih suara dominan pada Pemilu 2014 di Kota Kendari. Dominasi PAN di Kendari digantikan oleh PKS, yang dipimpin oleh Sulkarnain Kadir, Wakil Walikota Kendari yang kemudian menjadi Plt. Walikota menggantikan Adriatma Dwi Putra. Naiknya Sulkarnain sebagai Plt. Walikota membuka akses kekuasaan PKS terhadap birokrasi, program pembangunan dan penganggaran pemerintah.

Sosok Sulkarnain sendiri tidak terlalu menonjol seperti Rajiun Tumada di Muna Barat. Sulkarnain dalam menapaki karir politiknya lebih kalem dan bergerak secara senyap, sebagaimana strategi politik PKS pada umumnya. Sulkarnain sebelum bergabung dengan PKS merupakan seorang marketing dan secara perlahan merintis usaha sebagai developer/perumahan. Selain aktif sebagai pengusaha, ia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi UHO. Dunia usaha dan dunia kampus yang ia geluti semakin lengkap, ketika ia juga aktif dalam organisasi kepemudaan sebagai Ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah dan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UHO. Pada tahun 2002, ia diangkat sebagai bendahara umum PKS Sultra (2002-2004). Pada tahun 2004 ia terpilih sebagai anggota DPRD Kota Kendari dari PKS, selanjutnya di partai ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PKS Kota Kendari (2004-2010). Pada Pemilu legislatif 2009 dan 2014, Sulkarnain terpilih sebagai anggota DPRD Kendari. Pada Pilkada 2017 ia digandeng oleh PAN dan Adriatma Dwi Putra sebagai calon wakil walikota. Pada Pilkada itu keduanya berhasil terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kendari.

Pada Pemilu 2019, di Kabupaten Muna Barat, Partai Nasional Demokrat yang di-*backup* oleh La Ode Rajiun Tumada berhasil memenangkan Pemilu dengan raihan 9 kursi, dari sebelumnya hanya 2 kursi. Hal yang sama juga terjadi di Kota Kendari,

PKS yang dipimpin oleh Sulkarnain berhasil keluar sebagai partai pemenang Pemilu dengan raihan 7 kursi, yang pada pemilu sebelumnya hanya 4 kursi. Kenaikan suara Nasdem dan PKS yang sangat signifikan pada dua daerah ini tidak terlepas dari *power interplay* yang diperankan oleh dua kepala daerah di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari.

Tabel. 1. Perubahan Kursi Partai Politik di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari

<b>Kota Kendari</b>				
<b>Partai Politik</b>	<b>Pemilu 2014</b>	<b>Pemilu 2019</b>	<b>Perubahan Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
PKS	4	7	+3	Naik signifikan
PKB	1	1	0	Stabil
GERINDRA	5	4	-1	Turun
PDIP	4	5	+1	Naik
GOLKAR	4	5	+1	Naik
NASDEM	3	4	+1	Naik
PERINDO	-	2	+2	Pendatang baru
PAN	6	5	-1	Turun
DEMOKRAT	4	2	-2	Turun
PPP	1	0	-1	Turun
HANURA	2	0	-2	Turun
PBB	1	0	-1	Turun
PSI	-	0	0	Pendatang baru
GARUDA	-	0	0	Pendatang baru
BERKARYA	-	0	0	Pendatang baru
PKPI	0	0	0	Pendatang baru
<b>Kabupaten Muna Barat</b>				
<b>Partai Politik</b>	<b>Pemilu 2014</b>	<b>Pemilu 2019</b>		<b>Keterangan</b>
PKS	2	0	-2	Turun
PKB	1	1	0	Stabil
GERINDRA	1	1	0	Stabil
PDIP	1	2	+1	Naik
GOLKAR	4	3	-1	Turun
NASDEM	2	9	+7	Naik Signifikan
PERINDO	-	0	0	Pendatang baru
PAN	4	1	-3	Turun signifikan
DEMOKRAT	2	2	0	Stabil
PPP	2	1	-1	Turun
HANURA	1	0	-1	Turun
PBB	0	0	0	Stabil
PSI	-	0	0	Pendatang baru
GARUDA	-	0	0	Pendatang baru
BERKARYA	-	0	0	Pendatang baru
PKPI	0	0	0	Stabil

Sumber: olahan dari berbagai sumber, 2020.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perolehan kursi masing-masing partai politik ada yang menunjukan kestabilan dan perubahan. Perubahan tersebut ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Khususnya jika mengamati pada Partai Nasdem dan PAN di Muna Barat mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Kenaikan yang signifikan tampak pula pada PKS di Kota Kendari. Sementara PAN di Kota Kendari mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Hal yang bisa dijelaskan dari perbedaan penurunan suara PAN di Kota Kendari dan Kabupaten Muna Barat, bahwa konflik internal tampaknya lebih memiliki dampak yang kuat terhadap penurunan suara PAN, dibanding dengan peristiwa OTT KPK. Sementara itu kenaikan yang signifikan pada Partai Nasdem di Muna Barat dan PKS di Kota Kendari, menunjukkan adanya gejala yang kurang normal terhadap dua partai politik tersebut.

### ***Power Interplay Kepala Daerah Pada Pemilu 2019***

Pada tanggal 22 Juli 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menetapkan anggota DPRD terpilih. Berdasarkan pleno KPUD partai Nasional Demokrat keluar sebagai pemenang Pemilu tahun 2019 dengan raihan 17.345 suara. Setelah dikonversikan ke kursi, Partai Nasdem memperoleh 9 kursi legislatif, disusul Golkar 3 kursi, PDIP dan Demokrat masing-masing 2 kursi, serta PAN, PKB, Gerindra, PPP yang mengirim masing-masing 1 kursi. Bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014, perolehan suara partai Nasdem di Muna Barat mengalami kenaikan mencapai 350%, dimana sebelumnya anggota DPRD asal Nasdem hanya berjumlah 2 kursi. Hal yang menarik dari 9 caleg terpilih tersebut bukan berasal dari kader partai atau pe-ngurus partai Nasional Demokrat dari 20 Caleg, hanya 3 orang kader Nasdem, sisanya 17 bukan kader Nasdem diantara mereka adalah pindahan dari partai lain (PAN, PKS, PPP). Selain itu, para calon legislatif terpilih Partai Nasdem Muna Barat dikenal oleh khayalak sebagai orang dekat Bupati Muna Barat, diantaranya, keluarga, mantan anak buah, istri anak buah dan para loyalisnya.

Tabel. 2. Relasi Kekuasaan Anggota Legislatif Terpilih Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Muna Barat

<b>Nama</b>	<b>Relasi Kekuasaan</b>	<b>Keterangan</b>
Waode Sitti Sariani Illahi	Adik Kandung Bupati Muna Barat, L.M. Rajiun Tumada	Sebelum mencalonkan diri ia adalah pegawai honorer Pemda Muna Barat
Alibadin Fih	Sepupu Bupati dan mantan kepala dinas Pertanian Muna Barat (bawahan bupati Muna Barat, L.M. Rajiun Tumada)	Mengundurkan diri sebagai ASN setelah mencalonkan diri sebagai Caleg Nasdem
La Ode Sariba	Sekretaris Rajiun Center (Think Tank Bupati Muna Barat, L.M Rajiun Tumada)	Pemuda yang aktif sebagai sekretaris KNPI Muna Barat
Musliadi, S.Pd	Teman Semasa Kuliah L.M. Rajiun (saat ini Bupati Muna Barat) di Manado	Satpam di BPD Muna, ia juga aktif sebagai pelatih Karate. Karate adalah olahraga yang pernah mempopulerkan Bupati Muna Barat sebagai atlit Karate. Pernah kuliah di Manado dan

		aktif di Karate mempertemukannya dengan Laode Rajiun Tumada (saat ini Bupati Muna Barat).
Nur Aisyah Ilyas	Suami dari Nur Aisyah adalah sekretaris Bappeda Muna Barat (bawahan Bupati Muna Barat, L.M. Rajiun Tumada)	Eks anggota DPRD Muna Barat dari PPP.
Munartin	Saat menjadi Ketua PAN Muna Barat, L.M. Rajiun mengusulkan Munartin sebagai pengganti Laode Koso Ketua DPRD Muna Barat	Eks ketua DPRD Muna Barat (PAN). Pelantikan sebagai Ketua DPRD tidak terlepas dari peran Rajiun yang terpilih sebagai Ketua DPD PAN Muna Barat. Pasca terpilih, Rajiun mengganti ketua DPRD Laode Koso (sesama kader PAN) yang dipandang kritis terhadap pemerintahannya. Hubungan PAN dan Rajiun memburuk yang berujung pada pemecatannya sebagai ketua. Keluarnya Rajiun dari PAN diikuti pula oleh Munartin dan kader PAN lainnya yang mundur dari PAN dan mencalonkan diri sebagai Caleg Nasdem.
Anton Saiye	Mantan Kepala Desa	Eks Kader Golkar
Sitti Aisyah Maliawati	Istri camat Tikep Kabupaten Muna Barat	Ibu Rumah Tangga
Drs. Samad A. Syamsur	Eks Anggota DPRD Muna Barat	Pindah dari PAN ke Partai Nasdem.

Sumber: olahan peneliti, 2019.

Keterpilihan anggota legislatif dan perolehan kursi partai Nasdem yang menguasai 45 % (9 dari 20 kursi) DPRD Muna Barat tidak terlepas dari strategi partai Nasdem yang melakukan rekrutmen Caleg secara terbuka (inklusif), berbasis survei dan tanpa mahar politik. Para Caleg yang di-tetapkan oleh Partai Nasdem ini dikenal memiliki popularitas. Selain itu proses pencalegan di Partai Nasdem juga tidak terlepas peran Bupati Muna Barat, L.M. Rajiun Tumada, sebagaimana diutarakan oleh Ketua Partai Nasdem Muna Barat, La Insafu.

“...sesuai peraturan organisasi, dipartai itu kita melakukan seleksi secara terbuka, dari pendaftar 70 orang lalu kami melakukan penyaringan dengan cara, pertama, melakukan survey internal dengan menilai popularitas dan kompetensi. Setelah itu kami melakukan rapat di partai untuk menentukan nomor dan dalam tahapan itu kami juga berkomunikasi dengan pak Bupati. Hasil dari rapat itu lahirlah 20 nama termasuk saya dan pak sekretaris. Setelah pemilihan, Nasdem keluar sebagai pemenang dan itu wajar saja karena dipihaki oleh pemerintah (kekuasaan). Orang mungkin bertanya, apakah ada campur tangan pemerintah? Pasti ada, tapi tidak semua, kami secara struktur partai kita mandiri dan berdiri sendiri. Campur tangan Bupati misalnya dalam persoalan pencalegan, kemarin itu (saat pencalegan) semua yang masuk Caleg, diluar

kami, itu adalah orang-orang yang ada disekelilingnya beliau” (Wawancara La Insafu, 22 Juli 2019).

Hubungan pemerintah (bupati) dengan Partai Nasdem diakui pula oleh Sekertaris Partai Nasdem, Ahmad Abas. Menurutnya komunikasi yang baik antara pemerintah (Bupati) dengan Nasdem memberikan keuntungan bagi partai, sehingga diminati oleh banyak orang untuk pindah partai dan masuk Nasdem. (Wawancara, 22 Juli 2019). Selain campur tangan dalam proses pencalegan, Bupati Rajiun Tumada juga melakukan upaya terstruktur dalam memenangkan partai Nasdem di Muna Barat, diantaranya intervensi terhadap birokrasi dan ASN.

Kita itu di kantor disampaikan melalui atasan agar memilih partai pendukung pemerintah (Nasdem). Kalau tidak mengikuti maka ancaman macam-macam mulai dari mutasi, dipindahkan di tempat jauh, kalau honorer itu dipecat. Pemilihan kemarin saya dianggap tidak mengikuti kehendak atasan karena tidak bisa melarang keluarga saya yang ikut caleg. Saya dengar bulan 8 ini akan ada rotasi, mungkin saya salah satunya kena (Wawancara S, 23 Juli 2019).

Mutasi terhadap keluarga Caleg partai bukan pendukung kekuasaan telah dialami oleh sejumlah ASN, mereka dipindahkan di tempat yang jauh dari rumahnya. Pemberhentian pegawai pemerintah (honorer) disampaikan pula salah satu caleg dari luar partai Nasdem, dimana istri dan tetangga yang bekerja sebagai pegawai honorer tidak diperpanjang kontrak akibat ia maju menjadi caleg dari partai lain.

Istri saya itu SK honornya tidak diperpanjang setelah saya masuk caleg dia dipanggil Kadis. Tetangga saya yang mendukung saya, setengah jam menjelang pemilihan ditelfon dari kantornya (Kabid), bahwa ia melawan (tidak mengikuti instruksi pimpinan), karena itu iadilarang untuk tidakusah masuk kantor lagi (dipecat) (Wawancara U, 23 Juli 2019).

Pemecatan terhadap pegawai honorer akibat mendukung caleg diluar partai Nasdem diakui pula oleh salah satu anggota Panwas *ad hoc* di Kabupaten Muna Barat yang sempat melakukan mediasi.

Di wilayah saya itu ada guru honorer yang sudah sertifikasi diberhentikan oleh kepala sekolahnya akibat mendukung orang Demokrat. Saya waktu itu kemudian memediasi dan menemui kepala sekolah itu agar status guru ini dikembalikan sebagai honorer. Tapi waktu itu kepala sekolah itu menolak, alasannya jika ia tidak memberhentikan guru honorer tersebut, maka ia akan dipindahkan juga oleh atasannya (Wawancara L, 30 Juni 2019).

Ancaman terhadap ASN di Muna Barat diceritakan pula oleh salah satu komisioner Bawaslu Sultra, Siti Munadarma yang mendapatkan cerita dari sahabatnya (istri seorang kepala sekolah di Muna Barat).

Sahabat saya itu bercerita kepada saya mereka diberi target, juga dibebankan anggaran kepada mereka. Mereka juga diintervensi untuk memilih nama

(disebut) caleg tertentu di beberapa tingkatan (Wawancara Sitti Munadarma, 1 Juli 2019).

Berdasarkan temuan lapangan, penulis mendapatkan sebuah catatan ukuran kecil (12 x 7 cm) yang bertuliskan nama-nama caleg yang harus dipilih pada berbagai tingkatan. Menurut seorang informan kertas tersebut beredar dan dibagikan kepada masyarakat pada Pemilu 2019 di Muna Barat. Intervensi kekuasaan di Muna Barat dilakukan pula kepada para masyarakat penerima bantuan pemerintah—bibit, oven, penanaman kelapa, dll—dari Dinas Koperasi dan UKM.

Kami itu yang menerima bantuan diundang di rumah jabatan (RUJAB) Bupati. Pada saat masuk di Rujab, yang punya handphone dikumpul oleh Sat-pol PP (tidak boleh membawa HP), saat itu satu orang sempat ada yang protes, sehingga ia tidak masuk. Saat di dalam, Bupati dia arahkan untuk memilih partai Nasdem dan dia sebut nama, untuk DPR RI, Tina Nur Alam (Nasdem), DPRD Provinsi Laode Tariale (Nasdem), di Kabupaten disuruh memilih caleg Partai Nasdem. Kami juga dikasih sumpah dengan posisi duduk siap dan kaki menyentuh tanah, bagi yang mengkhianat maka tidak akan mendapat jalan yang baik (sumpah serapah) (Wawancara J, 23 Juli 2019).

Seorang informan menyebutkan bahwa pengumpulan di rumah jabatan dilakukan pula terhadap para PNS dan Hansip yang menjaga TPS. Para kepala desa juga tak luput dari ancaman pemecatan, membuka kasus dan membuka laporan pertanggungjawaban keuangan desa. (Wawancara U, 29 Juni 2019). Sebelumnya pada tahun 2017, sebanyak 24 Kepala Desa di periksa oleh Kejati Muna atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa (*Sultrakini.com*, 9/2/2017). Hingga tahun 2019, kasus dugaan penyalahgunaan dana desa di Muna Barat belum dituntaskan oleh Kejaksaan Muna. Kerja lamban Kejaksaan ini berbeda dengan Inspektorat Kabupaten Muna Barat yang bekerja lebih sigap. Setelah adanya laporan masyarakat, Inspektorat melakukan pemeriksaan, dan tindak lanjut dari itu, tiga kepala desa dinonaktifkan oleh Bupati guna dilakukan pembinaan (*Kendari Pos*, 24 Mei 2018). Menjelang Pemilu para kepala desa ini kembali diaktifkan dan sikap politik mereka seiring sejalan dengan kepala daerah. Salah seorang kepala desa bahkan melakukan tindakan pemecatan kepada perangkatnya, akibat tidak sejalan dengan pilihan politik kekuasaan. Di kejaksaan dan kepolisian kasus ini menjadi 'bola liar' yang menghantui para kepala desa, setelah dua institusi negara tersebut menyinggung kembali bahwa akan menindaklanjuti laporan penyalahgunaan keuangan desa (*Suara Merdeka Id*, 10 Mei 2019). Bersamaan dengan itu, di kalangan para kepala desa berkembang informasi agar mendukung dan memenangkan partai pemerintah (Nasdem) di desa mereka, demi mendapatkan perlindungan (tidak disentuh hukum).

Kepala desa itu mendapat tekanan mau diperiksa oleh inspektorat. Perangkat desa, kader desa (kader posyandu) itu tidak boleh lirikan Nasdem. Ada tiga orang perangkat di desa saya itu karena mendukung calon lain dipecat jadi perangkat. Pegawai negeri harus merekrut 10-15 orang. Untuk memastikan itu maka dilakukan pendataan, disetor dikoordinator kecamatan lalu dipresentasi-

kan dan dipastikan bahwa orang-orang itu tidak lari, jika ada yang dicurigai itu dilingkari (Wawancara U, 30 Juli 2019).

Di Kota Kendari, pada Pileg 2019, berdasarkan pleno KPU Kota Kendari, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh suara terbanyak dan berhasil menempatkan tujuh (7) kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari dari kuota 35 kursi dewan. PKS menguasai perolehan kursi di parlemen Kendari dengan meraup total 29.301 suara mengungguli sejumlah partai lain, diantaranya Nasdem 22.355 suara, PAN 20.140 suara, Gerindra 18.595 suara dan PDIP 17.089 suara. Caleg PKS yang berhasil lolos adalah Aman Labelo, Fitri Yanti Rifai, LaYuli, Riky Fajar, Jabar Al Jufri, Riski Brilian dan Subhan. Pencapaian yang luar biasa PKS Kota Kendari dengan komposisi 7 kursi di Pemilu 2019, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 75 %. Kenaikan suara PKS ini juga sekaligus memastikan jabatan ketua DPRD Kota Kendari menjadi milik PKS.

Keberhasilan PKS tidak terlepas dari faktor umat dan lima ruh kader dalam kemenangan PKS. Pertama, kesadaran politik umat yang terbangun di Kota Kendari. Faktor kedua adalah ruh militansi kader, ruh solidaritas pengurus (gotong-royong), keberpihakan kepada umat dan rakyat, ruh kreativitas dan inovasi dan ruh konsistensi. Strategi lain yang dilakukan oleh PKS Kota Kendari untuk memenangkan Pileg yaitu membangun hubungan baik dengan konstituen. PKS membantu memfasilitasi masyarakat apabila ada kegiatan masyarakat di 5 Dapil di Kota Kendari, misalnya, acara pernikahan PKS melayani dengan meminjamkan tenda, untuk kedukaan PKS melayani dengan mobil BERKHIDMAT. Strategi lainnya adalah FLASHMOP CAMPAIGN yaitu kampanye kreatif yang dilakukan PKS dengan berkeliling di 5 dapil Kota Kendari.

PKS dalam memenangkan Pemilu juga memanfaatkan posisi kadernya yang menjabat sebagai Walikota Kendari, Sulkarnain (Ketua DPD PKS Kota Kendari). Walikota dan PKS dalam Pemilu 2019 saling menopang. Walikota menggunakan sumber daya dan kewenangannya untuk membantu PKS dan para calegnya. Begitupun, PKS dan para calegnya memanfaatkan program-program pembangunan Walikota Kendari sebagai klaim kampanye, janji kampanye dan sumber pembiayaan Caleg.

Birokrasi memiliki peran penting dalam kerja-kerja politik PKS di Kota Kendari. Penangkapan dua Caleg PKS, Sulkhoni dan Riki Fajar bersama Camat Kambu (bawahan Walikota Kendari) oleh warga dalam sebuah rumah, mengkonfirmasi keterlibatan birokrasi dalam Pemilu di Kota Kendari. Keaktifan birokrasi dirasakan pula oleh para warga Kota Kendari yang berhubungan dengan kantor kelurahan (pemerintah) untuk mengurus keperluan administrasi. Salah seorang warga Kota Kendari menceritakan hal ini:

Sebelum Pemilu (2019) saya bersama istri pergi mem-Posyandu anak saya di kantor kelurahan. Di saat istri dan anak saya masuk kedalam, saya menunggu diluar, saat itu saya disamperin pak lurah dan ajak cerita tentang pemilihan

legislatif. Saya ditanya apakah sudah punya gambaran siapa yang akan di-pilih, saya hanya mengangguk, tapi saat itu pak Lurah minta bantu agar memilih PKS dan nama Calegnya. Saat itu pak Lurah menyebut bahwa mereka terserah yang diatas (Walikota), kalau di atas mengarahkan kemana kita mengikut. (Wawancara dengan E, 3 Juli 2019).

Kejadian yang serupa dialami pula oleh Sitti Munadarma, Komisioner Bawaslu Sultra yang sedang mengurus perizinan di kelurahan tempat tinggalnya di Kendari.

Saya saat itu mengurus perizinan di kantor kelurahan tempat tinggal saya. Pak lurah bilang kesaya, saya ini bu terus terang bekerja untuk calon PKS. Ketika dia bilang begitu, saat itu sempat mengingatkan bahwa silakan itu pilihan politik bapak secara personal, tapi bapak harus sadari bapak ini pejabat, pelayan masyarakat, kalau bapak seperti itu, jangan menggunakan kewenangan bapak dan jangan vulgar, apalagi ikut melakukan pertemuan-pertemuan. Sebagai kawan saya mengingatkan bapak dan mencegah, hati-hatilah. Dia sampaikan juga bahwa ia punya nomor kontak Caleg tertentu untuk berkomunikasi (Wawancara, 1 Juli 2019).

Di lain pihak, Walikota Kendari menjelang Pemilu 2019 aktif melakukan rotasi jabatan kepada para birokrat di lingkungan Kota Kendari. Pada tanggal 8 April Walikota melantik 51 ASN, selanjutnya pada tanggal 12 April Walikota kembali melantik 193 pejabat administrator di Kota Kendari. Meski pelantikan ini telah melewati proses rekomendasi ASN, berbagai spekulasi bermunculan mengingat waktu pelantikan hanya berselang 5 hari dengan hari pemilihan presiden dan legislatif 2019. Disamping pemanfaatan birokrasi, PKS menggunakan program pemerintah (seperti pembangunan fisik) untuk keperluan pencitraan dan janji kampanye sebagaimana diceritakan oleh warga yang menjadi tim pemenang Caleg PKS.

Saat pemilihan kemarin saya jalankan Caleg PKS, selain karena sudah kenal lama, saya juga berkepentingan memperjuangkan pengaspalan jalan dilorong. Pak Wali kan orang PKS dan caleg ini sangat dekat dengan beliau untuk bisa mengkomunikasikan pengaspalan. Dan terbukti, beberapa hari lalu saya sudah dikontak bahwa ini sudah masuk program pak Wali” (Wawancara A, 4 Juli 2019).

Pemberian paket pekerjaan (proyek pemerintah) kepada para Caleg PKS oleh pemerintah Kota Kendari, baik sebagai makelar atau pihak yang secara langsung mengerjakan proyek tersebut menjadi cerita para tim pelaksana proyek dan tim sukses lapangan. Seorang teman menceritakan bahwa temannya mengerjakan proyek pekerjaan yang diberi oleh salah satu Caleg PKS. Seorang tim sukses juga menceritakan hal ini, bahwa “kemarin pak Wali saya dengar memberi 2 paket pekerjaan pada si A dan 3 paket pekerjaan pada si B”. Bila mendengar cerita para pemilih yang diberi uang oleh para Caleg (diantaranya PKS) pada Pileg 2019, maka pemberian paket tersebut kuat dugaan memiliki keterkaitan dengan pembiayaan

politik uang di tingkat DPRD Kota Kendari yang berkisar antara 150 ribu rupiah sampai 800 ribu rupiah. Kerabat seorang Caleg Partai Demokrat berkisah bahwa kakaknya dikampung Bugis, dimana mayoritas keluarganya berdomisili disana tidak memilihnya karena diberi uang oleh Caleg lain sebesar 800 ribu rupiah. Mahalnya harga jual beli suara dalam pemilihan ini sejalan dengan cerita Aspinall dan Berencshot dalam bukunya *Democracy for Sale* (2019). Kedua ilmuwan ini menyebut bahwa politik uang semakin mahal pada daerah yang memiliki tingkatan wilayah lebih kecil. Seorang Caleg DPRD Kabupaten/Kota membayar lebih mahal pemilih, dibanding Caleg DPRD Provinsi dan di atasnya.

### **Dampak *Power Interplay* Kepala Daerah**

*Power interplay* kepala daerah memberikan dampak positif dan negatif dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam jangka pendek, *power interplay* sangat menguntungkan partai politik untuk bisa meraih dukungan elektoral dengan mudah. Kemenangan Partai Nasdem di Muna Barat dan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Kendari yang ditunjukkan dengan raihan suara dan perolehan kursi dominan di legislatif menempatkannya sebagai pemegang kursi pimpinan DPRD. Dalam konteks itu maka relasi eksekutif dan legislatif di Kabupaten Muna Barat dan Kota Kendari akan lebih mudah dan sejalan, mengingat pimpinan eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang sama. Hal ini akan mencegah terjadinya apa yang disebut dengan pembelahan pemerintahan (*devided government*). Pembelahan pemerintahan seringkali menyebabkan terjadi *deadlock* dan konflik antara legislatif dan eksekutif, sehingga sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Peristiwa ini pernah dialami oleh Kabupaten Muna Barat tahun 2016, dimana legislatif menolak APBD yang diusulkan oleh eksekutif.

Dalam jangka panjang, *power interplay* sangat mengancam eksistensi (melemahkan kelembagaan) partai politik dan sebaliknya makin memperkuat figur elit politik. Hal ini tentu sangat tidak baik untuk melakukan pembangunan kelembagaan partai politik sebagai representasi rakyat, yang pada ujungnya mengancam eksistensi demokrasi. Selain itu, *power interplay* juga sangat merusak pembinaan karir birokrasi. Upaya untuk membangun tatanan birokrasi yang melayani, *clean* dan *good governance* sulit diwujudkan ketika birokrasi dijadikan alat politik elite penguasa. *Power interplay* juga dapat merusak tatanan sosial, hubungan-hubungan sosial kewargaaan dan melahirkan konflik dan dendam yang berkepanjangan. Pada kondisi demikian, demokrasi sebagai sarana pengelola konflik akan dinilai gagal.

### **PENUTUP**

Fenomena perubahan suara (naik/turun) partai politik di tingkat lokal, tidak hanya dipengaruhi oleh adanya konflik, perpecahan, dan kegagalan kinerja partai politik dalam menarik simpati pemilih, namun sangat ditentukan pula keberpihakan kekuasaan kepala daerah. Hal ini mencerminkan betapa rapuhnya pelembagaan partai politik di tingkat lokal, disaat bersamaan personalisasi kekuasaan semakin

menguat. Partai politik di tingkat lokal tidak hanya dihadapkan pada persaingan sesama partai, namun juga dihadapkan pada penguatan person yang mempengaruhi naik/turunnya suara partai politik. Dalam jangka panjang hal ini sangat mengancam eksistensi partai politik dan demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aspinall, Edward & Berenschot, Ward. (2019). *Democracy for Sale. Pemilu, Klientalisme, Dan Negara di Indonesia* (terj). Jakarta: YOI.
- Budiarjo, Miriam. 1984. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Case, William. (2002). *Politics in Southeast Asia: Democracy or Less*. Mitccham Surrey: Curzon.
- Dahl, Robert A. 1957. *The Concept of Power Behavioral Science*.
- (1971). *Polyarchy. Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*. Jakarta: Rajawali Press.
- Katz, Ricahrd S dan Crotty, William. 2014. *Handbook Partai Politik* (terj). Bandung: Nusamedia.
- Laswell, Harold D, and Kaplan, Abraham. 1950. *Power and Society : A Framework for Political Inquiry*. London: Yale University Press.
- Moeloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

### Jurnal:

- Anggraini, Dewi., Husain, M Najib & Zuada, La Husen. (2017). Patronage In The General Election of Local Leader-Pemilukada: An Analysis of Kendari's Mayor Election in 2017. *Academic Research International*. Vol. 8(3), hlm. 109-119.
- Haryatmoko. Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu: Menyikap Kepalsuan Budaya Pengusa. *Jurnal Basis*, No. 11-12, Tahun ke 52, November-Desember, 2013.
- Husain, M Najib & Zuada, La Husen (2019). Politik Uang Mengalahkan Politik Etnis: Studi Kasus Pemilu Lokal di Kota Kendari. Draft Jurnal.
- Isna, Alizar. Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 23, No. 2, 2010.
- Krisdinato, Nanang. Pierre Bourdieu Sang Juru Damai. *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, Maret 2014, hlm, 107-206.
- Muhoffir, Abdil Mughis. Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No, 1, Januari 2013, hlm. 75-100.
- Nurdin, Ing., Suaib, Eka., Zuada, La Husen., Banne, Iwan Rompo. (2017). Filipinization of Indonesian Politics: Politics of Family Formation in Southeast Sulawesi. *Scientific Journal of PPI-UKM*. Vol. 3, No. 7, hlm. 333-340.

- Nurhasim. Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 10, No. 1, Juni 2013, hlm. 17-28.
- Zuada, La Husen & Suaib, Eka. (2017). Patronase dan Klientalisme Dalam Pemilukada: Studi Kemenangan Keluarga Petahana Pada Pemilihan Walikota Kendari Tahun 2017. *Proceeding Seminar Nasional APSIPOL*, hlm.174-193. Diselenggarakan Oleh Program Studi Ilmu Politik UNHAS, 17 Mei 2017.
- Zuhro, R. Siti. Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 16, No.1 Juni 2019, hlm. 69-81.

**Website:**

- Haerun (2019, April 12). Walikota Kendari Kembali Melakukan Mutasi Besar-Besaran. Inilahsultra.com. Diakses dari: <https://inilahsultra.com/2019/04/12/wali-kota-kendari-kembali-lakukan-mutasi-besar-besaran/>
- Putera (2018, Mei 24). Tiga Kades di Mubar di Berhentikan Sementara. Kendari Pos Co.Id. Diakses dari: <http://kendaripos.co.id/2018/05/tiga-kades-di-mubar-diberhentikan-sementara/>
- Rasyid, Arto (2017, Februari 9). Kepala BPMPD Mubar di Panggil Kejari Muna Soal 24 Kades Terduga Korupsi DD 2015. Sultrakini.com. Diakses dari: <https://sultrakini.com/berita/kepala-bpmpd-mubar-di-panggil-kejari-muna-soal-24-kades-terduga-korupsi-dd-2015>
- Sartiman, La Ode Pandi (2019, Maret 3). Warga OTT Caleg PKS dan Camat, Bawaslu Kendari Akan Libatkan Gakkumdu. Inilahsultra.com. Diakses dari: <https://inilahsultra.com/2019/03/03/warga-ott-caleg-pks-dan-camat-bawaslu-kendari-akan-libatkan-gakkumdu/>
- Suara Merdeka (2019, Mei 10). Kejaksan dan Polres Muna Akan Tindak Lanjuti Laporan Dana Desa. Suara Merdeka Com. Diakses dari: <https://suaramerdeka.id/6959/tindak-lanjuti-laporan-dana-desa/>